|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018,6 (2): 443-458  ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2016 |

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ABENOMICS* DI JEPANG TAHUN 2012-2017**

**Adi Abas[[1]](#footnote-1)**

**Nim.1002045049**

***Abstract***

*The 2008 global crisis, earthquake and tsunami disaster in 2011 also slowing economic growth have adversely affected Japan’s economy. In order to overcome this problem, the Japanese government under the leadership of Shinzo Abe, issued a set of policies namely Abenomics. The purpose of this research was to find out and to analyze the implementation of Abenomics policy as well as obstacle and support factors of Abenomics policy. This research used qualitative methods and used the concept of policy implementation, macroeconomic concept and theory of political system to perform the analysis in this research. The result of the implementation of Abenomics policy for monetary policy and structural reform has been achieved, namely achievement of 2% inflation growth and increasing participation of female workers and agriculture reform while for fiscal policy, 10% consumption tax increase still not achieved . For the obstacle factors of this policy can be seen in the diversity of the behavior of the target groups, the attitudes of the target groups and social conditions while the supporting factors can be seen in political and public support, recruitment and commitment and the ability of executing officials, clarity and consistency as well as funding sources, formal access for public and technological conditions.*

***Keywords :*** *Japan, Abenomics, Policy Implementation*

**Pendahuluan**

Jepang merupakan negara ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina dengan nominal GDP negara Jepang mencapai US$4.730.300 pada tahun 2016 selain itu Jepang juga merupakan negara pengekspor dan pengimpor terbesar keempat di dunia (https://www.cia.gov).

Sektor penggerak ekonomi Jepang lebih banyak di dominasi oleh sektor jasa yang meliputi jasa perbankan, asuransi, *real estate*, bisnis eceran, transportasi dan telekomunikasi yang menyumbang sebesar 71,1% dari total GDP Jepang, kemudian diikuti oleh sektor industri yang meliputi industri kendaraan bermotor, peralatan elektronik, mesin, baja dan logam non-besi, kapal laut, industri kimia, tekstil, dan industri makanan olahan menyumbang sebesar 27,7% dan sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 1,2% (https://www.cia.gov) .

Di awal tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Jepang bergerak lambat, Jepang mengalami penurunan GDP rill sebesar 0,7% dan penurunan 5,2% pada tahun 2009 diakibatkan oleh krisis global 2008. Krisis ini awalnya merupakan krisis ekonomi Amerika Serikat yang dimulai dari kredit perumahan yang macet kemudian menyebar ke seluruh negara di dunia (http://repository.usu.ac.id).Dampaknya negara-negara pengekspor pun mengalami penurunan ekspor terutama negara-negara yang mengandalkan ekspor mereka ke pasar-pasar Amerika dan Eropa, salah satunya adalah Jepang ([www.tradingeconomics.com](http://www.tradingeconomics.com)). Tercatat pada tahun 2008 ekspor Jepang senilai ¥81.018.087.607 dan pada tahun 2009 ekspor Jepang mengalami penurunan sebesar 33,1% yaitu hanya ¥54.170.614.088. Begitu pula dengan impor Jepang pada tahun 2008 mencatat transaksi senilai ¥78.954.749.926 dan mengalami penurunan sebesar 34,7% pada tahun 2009 dengan hanya ¥51.499.377.779 (http://www.customs.go.jp).

Selain itu, Jepang juga mengalami masalah ketenagakerjaan, tercatat tingkat pengangguran di Jepang pada bulan Desember tahun 2008 sebesar 4,4% dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 5,2%. (https://ycharts.com). Pada tahun 2011, Jepang ditimpa bencana gempa bumi disertai tsunami dan kebocoran nuklir yang memperparah kondisi perekonomian Jepang yang saat itu sedang berusaha memperbaiki perekonomiannya (http://ekonomi.inilah.com).

Berdasarkan permasalahan ekonomi yang terjadi di Jepang serta krisis global tahun 2008, Shinzo Abe yang di tahun 2012 terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai Perdana Menteri Jepang melakukan sebuah terobosan dengan mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi sebagai respon strategis untuk mengatasi masalah ekonomi di Jepang yang dikenal sebagai *Abenomics*, yang merupakan gabungan dari kata Abe dan *economics*. Kebijakan ini berfokus pada 3 hal penting yaitu stimulus moneter, stimulus fiskal dan reformasi struktural. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan *Abenomics* di Jepang tahun 2012-2017 serta faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan *Abenomics* di Jepang dalam mengatatasi masalah ekonomi yang dialami oleh Jepang. Karena pada periodesasi 2012 – 2017 merupakan awal dari dibuatnya kebijakan Abenomics dan implementasinya masih berlanjut hingga sekarang.

**Kerangka Dasar Teori**

***Konsep Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh sesuatu dari kebijakan. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2005:59). Menurut Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, ataupun dekrit presiden).

Ada beberapa model atau teori yang telah dikembangkan untuk membahas tentang implementasi kebijakan, salah satunya adalah model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang disebut *A frame Work for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan model implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar (Solichin Abdul Wahab, 2005:81), yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan.

2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya.

3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Ada 3 (tiga) variabel yang telah dipaparkan diatas seperti mudah atau tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses kebijakan serta variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Dalam 3 (tiga) variabel ini terdapat faktor-faktor yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan *Abenomics* di Jepang. Faktor–faktor di dalam variabel tersebut yang berjalan kemudian menjadi pendukung dalam proses pencapaian tujuan kebijakan *Abenomics* sedangkan faktor–faktor yang tidak berjalan kemudian menjadi penghambat dalam proses pencapaian tujuan kebijakan *Abenomics*.

***Konsep Kebijakan Makroekonomi***

Secara umum, kebijakan makroekonomi didefiniskan sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah makroekonomi yang dihadapi oleh suatu perekonomian, seperti pengangguran (*unemployment*), inflasi (*inflation*), pertumbuhan ekonomi yang lambat (*slow economic growth*), defisit neraca pembayaran (*balance of payment deficit*), dan lain sebagainya (Muana Nanga, 2001:179). Kebijakan fiskal dapat dibedakan ke dalam kebijakan fiskal aktif atau diskresioner dan kebijakan fiskal pasif atau nondiskresioner (Fahmi Irham, 2010:132).

Perubahan besar atas permintaan keseluruhan dinamakan goncangan permintaan sedangkan perubahan besar atas penawaran keseluruhan disebut goncangan penawaran (Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, 1984:122). Jika goncangan ini terjadi maka akan timbul perubahan perubahan besar dalam berbagai determinan dana agregat yang menjadi pusat perhatian ekonomi makro, seperti *output* lokal, kesempatan kerja total, tingkat harga dan upah rata-rata. Tapi perubahan tersebut tidak harus berlangsung terus tanpa dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah. Tindakan-tindakan pemerintah (yang kadang-kadang merupakan penyebab goncangan permintaan atau penawaran) dapat juga digunakan untuk meredam goncangan-goncangan ini atau mengubah akibatnya

Dalam garis besarnya, kebijakan makroekonomi dapat dibedakan ke dalam empat macam kebijakan (Muana Nanga, 2001:179), yaitu:

1. Kebijakan fiskal

2. Kebijakan Moneter

3. Kebijakan Pendapatan

4. Kebijakan Ekonomi Internasional

Berbagai jenis kebijakan makroekonomi tersebut di atas memiliki beberapa tujuan atau sasaran, atau yang sering disebut sebagai tujuan kebijakan makroekonomi (*macroeconomic policy goals*), yaitu :

1. Terciptanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi

2. Terciptanya stabilitas harga

3. Terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan

4. Terciptanya keseimbangan di dalam neraca pembayaran internasional

5. Terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata.

Kebijakan Abenomics terdiri atas 3 kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan fiskal aktif atau diskresioner yang bersifat ekspansioner yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan/atau penurunan penerimaan pajak.

2. Kebijakan moneter yang merupakan kebijakan moneter yang bersifat ekspansioner sekaligus bersifat kontraksioner yaitu kebijakan moneter dilakukan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar dan pengurangan tingkat bunga.

3. Kebijakan reformasi struktural berupa kebijakan program reformasi seperti keterbukaan terhadap orang asing dalam kehidupan sosial serta peningkatan partisipasi tenaga kerja wanita dan lain-lain.

***Teori Sistem Politik***

Teori David Easton mengenai sistem politik yang disadur mengenai proses politik, *“authoritative decision”* diambil dan dilaksanakan untuk masyarakat. Easton mengumukakan bahwa sistem politik sebagai sistem yang mempunyai beberapa tanda pengenal (Papasi, J.M, 2010:65). David Easton mengutarakan bahwa dalam suatu sistem politik (atau negara) selalu ada aliran *(flow)* terus-menerus dari *input* ke *output* dan bolak balik. *Input* terdiri atas tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan. Sistem politik yang terdiri dari pembuat keputusan dan aktor-aktor politik lainnya menerima *input* ini dan mempertimbangkan reaksi terhadap kebijakan-kebijakannya.

Sistem politik yang terdiri dari pembuat keputusan dan aktor-aktor politik lainnya menerima *input* ini dan mempertimbangkan reaksi terhadap kebijakan-kebijakannya. Informasi tadi dikonversikan dalam suatu *black box* yang terdiri dari institusi-institusi politik dan menghasilkan *output* dalam bentuk peraturan serta keputusan otoritatif. *Output* ini kembali lagi ke lingkungan melalui lingkaran umpan balik (*feedback loop*) dan ini menjadi *input* baru bagi sistem politik. Selalu tejadi suatu proses mencari kesimbangan (*equilibrium*). Proses ini terus berlanjut dan sistem politik dapat bertahan (*persist*), melalui suatu proses yang dinamis. Pemerintah tidak hanya menerima desakan dari luar tetapi juga dari sistem itu sendiri misalnya desakan dari partai politik atau departemen kabinet (Miriam Budiarjo, 2003:78). Di dalam sistem itu terdapat aktivitas yang *interrelated*, artinya satu dengan yang lain saling berhubungan dan membentuk suatu proses. Dalam sistem politik disebut juga proses politik. Langkah pertama mengidentifikasi sistem politik itu ialah mengenal unit-unitnya *(fundamental units)* dan mengenal batasnya (*boundaries)*,dan yang dimaksud oleh Easton dengan unitnya ialah tingkah laku. atau tindakan politik (*political actions*) tersusun dalam bentuk peranan politik (*political role*), dan *groups*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *boundaries* ialah dibatasi oleh semua peranan politik yang erat hubungannya dengan pengambilan keputusan (*political decision)*, dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan efeknya ialah bahwa keputusan dan kebijaksaan *(policy)* dalam implementasinya terdapat efektivitasnya, artinya dapat tercapai tujuan yang dicita-citakan. Pengambilan keputusan atau kebijakan *Abenomics* dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kondisi politik dalam negeri: Dominasi partai Demokratik Liberal (LDP) dan kemenangan Shinzo Abe dari sebagai Perdana Menteri Jepang untuk kedua kalinya pada tahun 2012.

2. Kondisi ekonomi: Jepang mengalami berbagai masalah ekonomi seperti deflasi, ekspor dan impor terganggu, pertumbuhan ekonomi melambat, peningkatan angka pengangguran dan lain sebagainya.

3. Konteks internasional: Dipengaruhi oleh elemen politis dan ekonomis, yang pertama adalah untuk meningkatkan citra Jepang dan yang kedua yaitu sebagai respon strategis Jepang terhadap krisis global tahun 2008

**Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu metode yang berupaya memberikan gambaran dan menjelaskan serta menganalisis bagaimana implementasi suatu kebijakan di negara tertentu dengan menggunakan beberapa fakta-fakta. .Jenis data yang dipakai yaitu jenis data sekunder yaitu data yang berasal dari hasil interpretasi data baik berupa buku, artikel dan akses media elektronik. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi literatur yaitu mencari dan membaca buku-buku, laporan jurnal, artikel, tabloid, koran, dan data-data internet baik nasional maupun internasional. Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dengan *content analysis* dimana penulis menganalisis data sekunder yang kemudian dengan menggunakan teori dan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang di teliti oleh penulis yaitu implementasi kebijakan *Abenomics* di Jepang.

**Hasil penelitian**

Artikel ini menjelaskan berawal dari kondisi ekonomi Jepang yang tidak stabil bahkan cenderung mengalami penurunan membuat pemerintah Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe mencari jalan untuk bisa memulihkan kembali ekonominya yang mengalami resesi yaitu dengan mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi yang dikenal dengan sebutan *Abenomics* pada tahun 2012.

***Kondisi Ekonomi Jepang dan Krisis Global***

Dalam pertumbuhan ekonominya, Jepang sering mengalami pasang surut dari tahun ke tahun terlihat pada tahun 1974 (W.G. Beasley, 1990:249-253) dimana pertumbuhan ekonomi Jepang turun hingga mencapai 0.5%. Hal yang berbeda terjadi pada tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an yaitu ekonomi Jepang mengalami pertumbuhan sebesar 11% akan tetapi pertumbuhan ini pun kembali melesu pada dekade 1990-an membaik. Secara keseluruhan, selama tiga dekade, pertumbuhan ekonomi Jepang sebenarnya amat mengagumkan: rata-rata 10% pada dekade 1960-an, rata-rata 5% pada 1970-an, dan rata-rata 4% pada 1980-an. Hal itu didorong dari banyaknya investasi di sektor-sektor industri dan juga tingginya tabungan rakyat pada saat itu yang membantu pertumbuhan perbankan yang solid. Modal ini kemudian banyak digunakan dalam hal pengenalan teknologi baru. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Jepang kembali melambat. Hal ini disebabkan oleh krisis global yang menimpa AS dan Eropa pada tahun 2008-2009. Krisis global ini ditandai oleh spekulasi pada produk derivatif berbasis investasi di sektor properti (*subprime credit* dan *collateral debt obligation* dari *subprime credit*), khususnya di Amerika (http://lib.ui.ac.id) dan juga merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir, bahkan para ekonom dunia menyebutnya sebagai *the mother of all crises* (journal.ipb.ac.id).

Jepang juga mengalami masalah pertumbuhan ekonomi yang melambat, ekspor dan impor terganggu serta masalah ketenagakerjaan. Persoalan ekonomi Jepang kian bertambah buruk dikarenakan bencana alam yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011, sebuah gempa berskala 9.0 dan tsunami setinggi 100 kaki menerjang pantai timur laut Jepang Tohoku, yang meliputi wilayah prefektur Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi dan Yamagata. Wilayah-wilayah ini bertanggung jawab atas 6-8% dari total produksi komoditas pertanian, baja, besi, semen dan penyulingan minyak negara Jepang. Bencana ini menghancurkan 138.000 bangunan dan diperkirakan kerusakan ekonomi yang dialami sekitar $360 miliar (https://www.thebalance.com). Hal ini membuatnya lebih buruk daripada gempa besar Hanshin 1995 di dekat Kobe, yang menelan korban lebih dari 6.000 jiwa dan kerugian sebesar $100 miliar. Gempa dan tsunami tersebut juga melumpuhkan industri nuklir Jepang. 11 dari 50 reaktor nuklir Jepang ditutup segera setelah bencana tersebut. Hal ini mengurangi pembangkit listrik negara sebesar 40%. Protes masyarakat yang intensif akibat bocornya reaktor nuklir menyebabkan 22 reaktor nuklir lainnya ditutup untuk pengujian dan peninjauan oleh pemerintah. Pada bulan Mei 2012, pembangkit nuklir Jepang tidak ada yang beroperasi. Akibatnya, Jepang harus mengimpor minyak untuk menggantikan kapasitas pembangkit nuklir.

Kondisi krisis ekonomi Jepang selain di pengaruhi oleh adanya faktor internal seperti gempa dan tsunami tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu krisis global yang membuat pemerintahan Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe dari Partai Demokratik Liberal (LDP) mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai *Abenomics*

***Kondisi Politik Jepang dan Dominasi LDP***

Menurut Konstitusi 1947, Jepang merupakan negara monarki konstitusional di bawah pimpinan kaisar Jepang dan parlemen Jepang. Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Perdana Menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Kabinet, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, bertanggung jawab terhadap Diet. Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang juga menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan, yaitu badan legislatif (Diet atau parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan) (http://www.zonasiswa.com). Dalam politik Jepang juga terdapat partai politik salah satunya adalahPartai Liberal Demokrat Jepang.

Partai Liberal Demokrat Jepang (LDP) merupakan partai politik terbesar Jepang, yang telah memegang kekuasaan hampir secara terus menerus sejak pembentukannya pada tahun 1955. Selama hampir empat dekade berkuasa tanpa gangguan (1955-1993), LDP sebagian besar mempertahankan kontrol pemerintah sejak pertengahan 1990an, pengecualian utama adalah periode 2009-2012, ketika Partai Demokratik Jepang (DPJ) berkuasa (https://www.britannica.com). Dominasi LDP dapat terlihat dari jumlah pewakilannya di dalam Diet Jepang, yaitu LDP memiliki 290 kursi di Majelis Rendah dan 122 kursi di Majelis tinggi terpaut jauh dengan pesaingnya di partai lain yaitu DPJ yang memiliki perwakilan 97 kursi di Majelis Rendah dan 49 kursi di Majelis Tinggi dan Partai Kemeito yang hanya memiliki perwakilan 35 kursi di Majelis Rendah dan 25 kursi Majelis Tinggi. Dominasi Partai Liberal Demokrat Jepang (LDP) dalam perpolitikan Jepang memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Pemerintahan Jepang saat ini berada dibawah kepemimpinan Shinzo Abe dari LDP (*Liberal Democratic Party*) yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang sebanyak 3 kali yaitu, tahun 2006-2007, 2012-2014, 2014 hingga sekarang (https://profil.merdeka.com). Sebelum pemerintahan Shinzo Abe yang kedua, Jepang mengalami beberapa masalah ekonomi, seperti petumbuhan ekonomi yang melambat, defisit, pengganguran meningkat, ekspor dan impor terganggu dan lain-lain. Untuk merefleksikan ekonomi Jepang dan memperbaikinya, Shinzo Abe, mengusulkan tiga panah dari apa yang telah dikenal sebagai *Abenomics* yaitu stimulus moneter, stimulus fiskal dan reformasi struktural. Abe ingin mengekspansi [ekonomi Jepang](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Jepang) yang masih terhambat akibat [resesi ekonomi global](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Resesi_akhir_2000-an&action=edit&redlink=1). Panah pertama akan memobilisasi kekuatan produktif Jepang dan yang ketiga akan memperluasnya, sehingga panah kedua dapat mencapai target fiskal yang ambisius (<http://www.economist.com>).

***Pemerintahan Shinzo Abe dan Kebijakan Abenomics***

Pemerintahan Jepang saat ini berada dibawah kepemimpinan Shinzo Abe dari LDP (*Liberal Democratic Party*) yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang sebanyak 3 kali yaitu, tahun 2006-2007, 2012-2014, 2014 hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Shinzo Abe yang pertama yaitu tahun 2006-2007, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Abe pada masa pemerintahannya, seperti kebijakan ekonomi berupa reformasi fiskal dengan mengurangi pembelanjaan negara guna mengimbangi kemampuan finansial Jepang, dan pada bulan Maret 2007, Abe telah mengusulkan sebuah undang-undang untuk mendorong nasionalisme dan “*cinta untuk negara dan kampung halaman”* di kalangan pemuda Jepang (kata-kata spesifik yang direvisi dari "undang-undang dasar pendidikan/"教育基本法", yaitu penambahan kata “*cinta negara*”. Selain itu pada masa kepemimpinannya, Abe menolak untuk meloloskan amandemen yang diajukan oleh Diet untuk memperbolehkan wanita mewarisi Takhta Krisantemum atau Singgasana Kaisar Jepang. Abe juga mengeluarkan beberapa kebijakan luar negeri seperti diplomasi antara Jepang dan Korea Utara mengenai penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara serta peningkatan hubungan antar negara Asia Timur yaitu Jepang, China, Taiwan dan Korea Selatan.

Saat masa pemerintahannya sebagai Perdana Menteri hampir mencapai setahun, Abe mengumumkan pengunduran dirinya pada [12 September](https://id.wikipedia.org/wiki/12_September" \o "12 September) [2007](https://id.wikipedia.org/wiki/2007" \o "2007), namun ia terus menjabat hingga penggantinya, Yasuo Fukuda terpilih sebagai Ketua LDP pada [23 September](https://id.wikipedia.org/wiki/23_September" \o "23 September) [2007](https://id.wikipedia.org/wiki/2007" \o "2007). Alasan pengunduran diri Abe dikarenakan kesehatan yang memburuk dan turunnya popularitas Abe dikarenakan skandal korupsi Menteri kabinetnya serta ketidakberhasilan Abe mencegah keterlibatan militer Jepang di Afganistan. Pada [26 Desember](https://id.wikipedia.org/wiki/26_Desember" \o "26 Desember) [2012](https://id.wikipedia.org/wiki/2012" \o "2012), ia kembali terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang menggantikan [Yoshihiko Noda](https://id.wikipedia.org/wiki/Yoshihiko_Noda" \o "Yoshihiko Noda), terpilihnya Shinzo Abe ini menyusul setelah partainya, LDP memenangkan Pemilu di awal bulan Desember 2012. Pada pemerintahanya yang kedua, Abe mengumumkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang disebut *Abenomics* yang berlangsung hingga pemerintahanya yang ketiga, 2014-sekarang. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah ekonomi Jepang akibat krisis global dan bencana alam seperti petumbuhan ekonomi yang melambat, pengangguran meningkat, ekspor dan impor terganggu dan lain-lain.

Untuk merefleksikan ekonomi Jepang dan memperbaikinya, Shinzo Abe, mengusulkan tiga panah dari apa yang telah dikenal sebagai *Abenomics* yaitu stimulus moneter, stimulus fiskal dan reformasi struktural. Abe ingin mengekspansi [ekonomi Jepang](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Jepang) yang masih terhambat akibat [resesi ekonomi global](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Resesi_akhir_2000-an&action=edit&redlink=1). Panah pertama akan memobilisasi kekuatan produktif Jepang dan yang ketiga akan memperluasnya, sehingga panah kedua dapat mencapai target fiskal yang ambisius.

1. Kebijakan Stimulus moneter, Stimulusmoneter merupakan kebijakan moneter yang bersifat ekspansioner sekaligus bersifat kontraksioner yaitu kebijakan moneter dilakukan melalui peningkatan jumlah uang yang beredar dan pengurangan tingkat bunga. BOJ (*Bank of Japan*) mencetak antara ¥60-70 triliun serta menurunkan suku bunga dalam upaya untuk memaksa menghasilkan beberapa tekanan inflasi. Meskipun tidak secara eksplisit ditargetkan, harapan bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan pelemahan yen dan kenaikan tingkat harga dalam negeri.

2. Kebijakan Stimulusfiskalyang merupakan kebijakan fiskal aktif atau diskresioner yang bersifat ekspansioner yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan/atau penurunan penerimaan pajak melibatkan stimulus fiskal jangka pendek. Ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan secepatnya melalui peningkatan konsumsi dan investasi pada sektor  publik pemerintah. Intinya adalah bahwa pemerintah Jepang menghabiskan lebih banyak pembelanjaan negara terutama untuk sektor kesejahteraan, utang, pekerjaan umum seperti pembangunan infrastuktur, untuk meningkatkan ekonomi Jepang.

3. Kebijakan Reformasi Struktural seperti: reformasi a*griculture,* reformasi energi, pajak, pekerja dan *womanomics, Cool Japan* dan lain-lain.

Kebijakan *Abenomics* ini selain ditargetkan untuk pemulihan ekonomi domestik Jepang juga untuk menjaga keseimbangan ekonomi internasional seperti meningkatkan permintaan domestik, meningkatkan pertumbuhan *gross domestic product* (GDP) sekaligus meningkatkan inflasi, meningkatkan prospek negara dengan meningkatkan daya saing, reformasi pasar tenaga kerja, dan memperluas kemitraan perdagangan.

***Implementasi Kebijakan Abenomics di Jepang***

Di dalam Kebijakan *Abenomics*, ada beberapa program yang dijalankan untuk mengatasi masalah ekonomi di Jepang. Program-program tersebut terbagi dalam 3 bentuk kebijakan, yaitu Kebijakan stimulus moneter, stimulus fiskal, reformasi struktural.

1. Kebijakan Stimulus Moneter, Kebijakan pertama dalam kebijakan *Abenomics* yaitu kebijakan moneter yang ekspansif merupakan salah satu mesin utama pendorong *Abenomics* untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan inflasi hingga 2%. Kebijakan ini memiliki 3 program/kebijakan yaitu, kebijakan *reflektifis prototipikal* melalui penggandaan basis moneter*, quantitative easing* melalui pembelian aset negara dan *zero bound* melalui penurunan suku bunga bank*.* Organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah Bank Sentral Jepang (BOJ) (http://www.yomiuri.co.jp).

Pada bulan April 2013, Bank Sentral Jepang mengumumkan kebijakan moneter yang dikenal sebagai pelonggaran moneter yang berbeda di bawah sistem baru yang dipimpin oleh Gubernur Haruhiko Kuroda, Deputi Gubernur Kikuo Iwata, dan Wakil Gubernur Hiroshi Nakaso, yang semuanya ditunjuk oleh Kabinet Abe pada bulan Maret 2013. Kebijakan moneter Bank Sentral Jepang di bawah sistem baru ini adalah kebijakan *reflektifis prototipikal* yang mengusulkan sebuah kebijakan reflasi yang berusaha keluar dari deflasi dengan sengaja menciptakan inflasi ringan dengan membuat bank sentral menetapkan target inflasi sekitar 2% per tahun. Secara khusus, kebijakan tersebut adalah menggandakan basis moneter bank dan beralih untuk mengendalikan yield curve control.

Selanjutnya Bank Sentral Jepang (BOJ) melalui kebijakan *quantitative easing* berhasil menurunkan nilai yen dari $0,013 menjadi $0,0083. Pengeluaran bank sentral sama dengan 18% GDP negara dan menyumbang hampir semua pinjaman pemerintah. Bank Jepang telah memasuki fase QE yang terbuka, yang mencakup pembelian aset tahunan sebesar $660 miliar dan akan berlanjut sampai target inflasi 2% tercapai. Skala pembelian yang dilakukan BOJ merupakan yang tertinggi di manapun di dunia.

Nilai aset yang dimiliki oleh BOJ telah melampaui 70% dari GDP, sementara aset Bank Sentral AS dan Bank Sentral Eropa, keduanya berada di bawah 25% dari masing-masing GDP (http://www.btinvest.com). Bank Sentral Jepang juga melalui kebijakan *zero bound* atau sistem suku bunga bank 0% dilakukan untuk memacu pinjaman dan investasi. Kemudian pada tahun 2016 Kuroda membuat keputusan tak terduga dengan memperkenalkan suku bunga negatif atau suku bunga bank di bawah 0%. Hal ini menjadikan BOJ bersama dengan ECB, Denmark, Swedia, dan Swiss sebagai satu-satunya bank sentral yang mendorong suku bunga bank di bawah "*zero bound*".

Penerapan ketiga program dalam kebijakan stimulus moneter ini belum memperlihatkan hasil yang diharapkan sehingga target inflasi 2% yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang dan BOJ masih belum bisa dicapai dan harus beberapa kali mengalami penundaan pencapaian target sebanyak 6 kali hingga tahun 2019.

2. Kebijakan Stimulus Fiskal, Kebijakan kedua *Abenomics* adalah kebijakan fiskal yang fleksibel dan ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jepang dalam jangka pendek. Kebijakan ini memiliki 2 program atau kebijakan yaitu, program peningkatan anggaran pembelanjaan negara dan program peningkatan pajak konsumsi. Pada tanggal 8 Agustus 2013, pemerintah menerbitkan rencana fiskal jangka menengah, yang bertujuan mengurangi defisit anggaran hingga setengahnya pada tahun 2015 (dibandingkan tahun 2010) dan menghilangkan defisit fiskal pada tahun 2020. Pemerintah juga menerbitkan perhitungan *trial* mengenai ekonomi dan keuangan publik dalam *Medium to Long Term*, yang memeriksa apakah rencana fiskal dapat mencapai tujuannya (http://www.nomurafoundation.or.jp). Kebijakan fiskal melalui program pertama adalah untuk meningkatkan belanja pemerintah. Peningkatan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembelanjaan negara. Pemerintah Abe dengan cepat mengumpulkan anggaran tambahan untuk tahun 2012 (April 2012 sampai Maret 2013) dan menyerahkannya ke Diet pada tanggal 15 Januari 2013. Anggaran tambahan yang disetujui dan dikeluarkan Diet pada tanggal 26 Februari sebesar ¥13,1 triliun. Sebagian besar pembelanjaan negara Jepang digunakan untuk pekerjaan umum berupa rekonstruksi (setelah gempa bumi, tsunami, dan bencana nuklir tahun 2011) dan pencegahan bencana (¥3,8 triliun) dan kebijakan pertumbuhan (¥3,1 triliun, yang mencakup ¥946 miliar untuk pertanian dan Subsidi UKM). Lebih dari separuh anggaran (¥7,8 triliun) dibiayai dengan menerbitkan obligasi pemerintah.

Anggaran untuk tahun 2013, yang mendapat persetujuan akhir pada 15 Mei 2013. Total belanja mencapai ¥92,6 triliun, yaitu ¥2,3 triliun lebih besar dari anggaran untuk tahun 2012 (tanpa termasuk anggaran tambahan). Jumlah penerbitan obligasi baru adalah ¥42,9 triliun, menurut pemerintah, yang sedikit di bawah perkiraan penerimaan pajak (¥43,1 triliun). Namun itu tidak termasuk jumlah *Special Case Bonds for Pensions*, yang digunakan untuk membiayai transfer dari pemerintah pusat ke rekening jaminan sosial dan mencapai ¥2,6 triliun. Jika menambahkan ini pada pinjaman baru, pemerintah Jepang masih mengharapkan pinjaman lebih banyak dari penerimaan pajak di tahun 2011. Program yang kedua adalah peningkatan pajak konsumsi yang di lakukan secara bertahap oleh pemerintah Jepang untuk meningkatkan hasil pendapatan negara melalui pajak. Jika tingkat pertumbuhan riil Jepang pulih rata-rata 3,4% per tahun antara tahun 2013 dan 2022, pemerintah dapat mencapai tujuan untuk mengurangi defisit anggaran hingga setengahnya pada tahun fiskal 2015, namun tidak dapat menghilangkan defisit pada tahun 2020. Rasio utang terhadap GDP akan berhenti naik dan tapi tidak akan turun. Jika pemulihan ekonomi ternyata lebih lemah dan ekonomi tumbuh rata-rata 1,3% per tahun antara tahun 2013 dan 2022, pemerintah akan kehilangan tujuan mengurangi separuh defisit anggaran pada tahun 2015 juga. Dalam hal ini, rasio utang terhadap GDP pemerintah diperkirakan akan terus meningkat. Kebijakan fiskal di Jepang dalam dua dekade terakhir gagal meningkatkan potensi pertumbuhan. Kebijakan ini mungkin telah membantu merangsang *demand*, namun hal itu menyebabkan peningkatan yang sangat besar dalam utang pemerintah. Rasio GDP terhadap GDP saat ini melebihi 230% dan defisit anggaran sekitar 9% dari GDP. Situasinya jauh lebih serius daripada tahun 1996.

3. Kebijakan Reformasi Struktural, Kebijakan ketiga ini memiliki beberapa program atau kebijakan seperti:

a) *Agriculture* dan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Pertanian ditempatkan sebagai pusat paket kebijakan ekonomi Shizo Abe. Shinzo Abe telah berulang kali mengungkapkan ekspektasi tingginya pada pertanian Jepang sebagai salah satu industri yang paling menjanjikan. Abe berpendapat bahwa pendapatan pertanian harus berlipat ganda dan ekspor pertanian harus tiga kali lipat jika kekuatan pengisiannya diberikan. Kebijakan pertanian Abe sangat kontras dengan kebijakan pertanian tradisional di pemerintahan LDP sebelumnya (termasuk kabinet Abe pertama dari tahun 2007 sampai 2008) (http://fsi.stanford.edu). Reformasi pertanian adalah salah satu keberhasilan terbesar Abe sampai saat ini, yang mematahkan kekuatan dari kepentingan kelompok petani yang kuat. Kemajuan reformasi pertanian ini sangat penting bagi upaya Abe untuk menyelesaikan keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* (TPP), sebuah perjanjian perdagangan bebas regional dengan Amerika Serikat dan sebelas negara di Pasifik lainnya. Industri pertanian Jepang khususnya melobi kesepakatan tersebut dan menolak penghentian tarif tinggi dan tindakan perlindungan lainnya (<https://www.cfr.org>).

Jepang mulai melakukan negosiasi keanggotaan TPP pada Mei 2013 dan melakukan penandatanganan TPP pada Februari 2016. Tantangannya sekarang adalah mengubah reformasi menjadi produktivitas pertanian dan meneruskan kesepakatan perdagangan *Trans-Pacific Partnership*. Keikutsertaan Jepang dalam TPP merupakan salah satu upaya Jepang dalam mencapai tujuan *Abenomics* yaitu mempeluas kemitraan Jepang dan memperluas pasar bagi produk-produk Jepang.

b) Energi, Abe berupaya untuk memenuhi tujuannya dalam mengatasi masalah krisis energi yang melanda Jepang pasca bencana alam gempa dan tsunami tahun 2011 yang menyebabkan 42 pembangkit tenaga nuklir Jepang dinonaktifkan. Untuk beroperasi kembali, sebuah reaktor harus memenuhi serangkaian persyaratan peraturan dan menerima persetujuan dari pemerintah daerah. Sejauh ini sudah ada 4 pembangkit nuklir yang kembali beroperasi secara komersial yaitu Takahama 4, Kyushu Electric's Sendai 1 dan 2, dan Ikata Shikoku Electric 3. Sisa armada nuklir Jepang lainnya masih belum beroperasi semenjak bencana alam tersebut dan masih dalam tahap uji coba dan menunggu keputusan pemerintah daerah masing masing (https://www.nei.org).

c) Reformasi Pajak, Jepang masih merupakan salah satu negara dengan tarif pajak perusahaan tertinggi di *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Salah satu upaya pemerintah Jepang adalah menurunkan pajak perusahaan domestik dan perusahaan asing yang ada di Jepang. Perusahaan domestik di Jepang dikenai pajak atas pendapatan yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri yaitu termasuk pendapatan cabang asing (http://taxsummaries.pwc.com). Sementara untuk Perusahaan asing yang beroperasi di Jepang hanya bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang berasal dari domestik Jepang. Pemerintahan sebelum Abe menetapkan pajak bagi perusahaan adalah sebesar 40,69% dan ini terus berlangsung hingga tahun 2011. Pada tahun 2012 Abe terpilih sebagai PM dan memotong tingkat pajak perusahaan Jepang menjadi 38,01%, di tahun selanjutnya pajak perusahaan tidak berubah dan kemudian tahun 2014 kembali mengalami pemotongan menjadi 35,64%. Pada dasarnya pemerintah Abe akan terus melakukan pemotongan pajak perusahaan hingga mencapai target yaitu 20%.

d) *Cool Japa*n, Perdana Menteri Shinzo Abe telah memerintahkan Tomomi Inada, menteri negara untuk reformasi administrasi, untuk juga menjabat sebagai menteri strategi untuk program *Cool Japa*n. Abe juga telah meluncurkan panel ahli yang bertujuan untuk mempromosikan kampanye *Cool Japa*n pemerintah. Langkah-langkah ini mencerminkan niat Perdana Menteri untuk membuat inisiatif *Cool Japan* menjadi bagian dari strategi pertumbuhan yang dilakukan oleh pemerintah (<http://www.nationmultimedia.com>). Kebijakan pemerintah untuk mempromosikan bisnis yang berkaitan dengan budaya *Cool Japan* ke tingkat yang dapat dibanggakan layak untuk dicapai. Landasan inisiatif *Cool Japan* adalah industri konten, yang memproduksi film, anime dan permainan video. Pemerintah telah mengalokasikan ¥50 miliar dalam anggaran fiskal 2013 untuk membentuk dana yang ditujukan untuk mempromosikan kampanye *Cool Japan* untuk memberikan dukungan finansial dan publisitas yang efektif. Penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bergandengan tangan merancang strategi mempromosikan kampanye *Cool Japan*.

e) Reformasi Pekerja dan *Womanomics,* Reformasi pasar kerja telah berfokus pada rencana *womanomics*. Hal ini untuk menaikkan tingkat partisipasi perempuan dari 68% menjadi 73% pada tahun 2020. Pemerintah telah meminta perusahaan untuk meningkatkan penunjukan posisi manajemen perempuan. Tujuan awalnya adalah agar para wanita mengisi sepertiga posisi bisnis senior pada tahun 2020. Pemerintah berpendapat bahwa menaikkan upah dan status perempuan di pasar tenaga kerja juga akan meningkatkan tingkat kesuburan, menunjuk ke negara-negara seperti Swedia dan Denmark yang memiliki lapangan kerja perempuan dan kesuburan yang lebih tinggi. Partisipasi pekerja wanita Jepang telah mencapai rekor tertinggi 65% dan Abe telah vokal dalam masalah ini, dengan undang-undang kesetaraan gender baru yang memaksa perusahaan dengan setidaknya 300 karyawan memperbaiki dan menerbitkan target untuk mempromosikan perempuan sebagai manajer.

Abe juga telah menjanjikan reformasi ketenagakerjaan yang lebih luas untuk memecah sistem ketenagakerjaan Jepang menjadi dua tingkat yaitu, kelas pekerja temporer dan pekerja tetap dari angkatan kerja reguler. Sejauh ini, kebijakan perburuhannya berfokus pada pengurangan budaya kerja paksa yang menyebabkan kenaikan depresi dan bunuh diri. Pemerintah Abe berjanji untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Lebih dari 620.000 lebih wanita yang bergabung dengan angkatan kerja sejak pemerintahan tersebut mulai berkuasa. Ditambah lagi, pemerintah Abe juga berjanji untuk meningkatkan fasilitas penitipan anak untuk mengurangi kekurangan yang telah dihadapi oleh sebagian besar negara. Hal lain yang menjadi fokus Abe yaitu masalah pengangguran, dengan kebijakannya Abe bertujuan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Jepang. Sejauh ini tingkat pengangguran di Jepang turun menjadi 2,8% pada Juni 2017.

f) Proyek Global 30 (G30) dan Universitas Super Global, Global 30 atau G30 merupakan proyek yang dimulai pada tahun 2009 diakhiri pada tahun 2014 untuk membangun Universitas Utama untuk internasionalisasi bertujuan menciptakan lingkungan yang memudahkan siswa internasional yang ingin belajar di Jepang dan mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi saat melakukannya. Global 30 atau G30 merupakan proyek dari *Japan* *Society for Promotion of Science*, Global 30 bertujuan: (1) membangun sebuah sistem untuk menyediakan kelas dalam bahasa Inggris, (2) memperbaiki sistem untuk menerima siswa internasional, (3) mempromosikan kerja sama internasional dan (4) memelihara personil unggul yang dapat berperan aktif dalam arena global di lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka dalam kompetisi yang bersahabat. Secara khusus Global 30 bertujuan untuk memungkinkan siswa internasional untuk memulai dan menyelesaikan pendidikan universitas Jepang mereka dalam bahasa Inggris, merekrut fakultas internasional melalui bukaan yang dikirim secara internasional, dan memperbaiki sistem untuk menerima siswa berkualitas. Global 30 bertujuan untuk akhirnya membawa 300.000 siswa internasional ke universitas di Jepang. G30 sekarang digantikan proyek Universitas Super Global. Proyek ini berada dibawah naungan [*Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*](https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education,_Culture,_Sports,_Science_and_Technology) (MEXT) dan pemerintah Jepang bertujuan untuk membantu lebih banyak universitas di Jepang untuk masuk dalam 100 besar di seluruh dunia pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompatibilitas dan daya saing internasional pendidikan tinggi di Jepang. Ini memberikan dukungan yang diprioritaskan untuk universitas kelas atas dan universitas paling inovatif yang dapat memimpin internasionalisasi universitas-universitas Jepang.

***Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Kebijakan Abenomics***

Hal-hal yang menjadi penghambat implementasi kebijakan *Abenomics*, seperti:

1. keragaman perilaku kelompok sasaran. Sebagaimana telah dipaparkan pada uraian implementasi kebijakan sebelumnya bahwa setiap kelompok masyarakat ataupun lingkungan masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Dalam pelaksanaan kebijakan *Abenomics*, para pelaksana harus menyesuaikan kebutuhan/kepentingan dengan ketentuan yang diinginkan oleh setiap kelompok sasaran. Seperti misalnya kelompok petani Jepang tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dengan kelompok buruh, untuk mengetahui kebutuhan dan kepentingan yang diinginkan oleh tiap kelompok, Pemerintah harus melakukan kajian yang lebih dalam yang memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah dan kelompok sasaran.

2. Sikap-sikap dan sumber yang dimiliki kelompok, kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah ini pada dasarnya bertujuan baik yaitu guna membangun kembali ekonomi Jepang yang mengalami resesi, namun dalam implementasinya ada beberapa pertentangan yang terjadi, salah satunya anatara Pemerintah dengan kaum petani. Abe mengklaim bahwa batu sandungan utama untuk pertanian terlalu banyak kekuatan politik Serikat Koperasi Pertanian, yang secara populer disebut Zenchu, yang merupakan badan apeks sistem koperasi pertanian Jepang. Di antara media massa Jepang, Zenchu ​​telah digambarkan sebagai salah satu kelompok pemungutan suara paling kuat untuk Partai Demokrat Liberal. Menurut Abe, Zenchu ​​hanya memperhatikan kepentingannya sendiri dan mencegah inovasi di industri pertanian. Dalam sesi Diet saat ini, Abe telah mengajukan permintaan baru untuk mengurangi kekuatan Zenchu.

3. Kondisi sosial, sifat apatis masyarakat Jepang terutama kaum mudanya, dalam partisipasi perpolitikan di Jepang menjadi salah satu hambatan bagi pencapaian tujuan *Abenomics*. Ketidakpedulian politik di kalangan anak muda bukanlah hal baru di Jepang. Pada pemilihan Majelis Rendah 2014, jumlah pemilih di usia 20-an hanya 32,6%, jauh lebih rendah daripada jumlah pemilih keseluruhan sebesar 52,7%. Sebaliknya, pemilih di usia 60-an adalah 68,3% dan 59,5% pemilih di usia 70-an memberikan suara. (http://www.japantimes.co.jp)

Hal-hal yang menjadi pendukung implementasi kebijakan *Abenomics,* seperti:

1. Dukungan politik dan publik. Meskipun terjadi penurunan, dukungan masyarakat sebenarnya masih cukup tinggi terhadap pemerintahan Shinzo Abe. Dukungan dari parlemen pun sangat tinggi hingga membuat Shino Abe menang telak pada pemilu ulang tahun 2014 (https://nasional.sindonews.com). LDP meraih 2/3 dari total 475 kursi majelis rendah. LDP memborong 291 kursi.

2. Rekruitmen dan komitmen serta kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana, Jepang adalah salah negara yang paling tidak korup dari 175 negara, menurut Indeks Persepsi Korupsi 2016 yang dilaporkan oleh *Transparency International* (http://www.tradingeconomics.com)pp. Peringkat Korupsi di Jepang rata-rata 19,36 dari tahun 1995 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 25 pada tahun 1998 dan rekor terendah 14 pada tahun 2011. Kualitas pejabat Jepang yang baik dan tidak korup tentu berdampak baik terhadap implentasi kebijakan *Abenomics* dan pencapaian tujuannya.

3. Kejelasan dan konsistensi tujuan dan sumber dana, dalam hal ini pemerintahan Shinzo Abe berupaya merumuskan kebijakan-kebijakan sesuai dengan urutan kepentingan berdasarkan pada akar permasalahan ekonomi yang terjadi di Jepang, Shinzo Abe dan pemerintahannya berupaya mengelompokkan aksi-aksi penanganan masalah ekonomi tersebut kedalam beberapa kombinasi kelompok kebijakan yang secara garis besar terbagi atas 3 kebijakan utama yaitu kebijakan stimulus moneter, stimulus fiskal dan reformasi struktural. Tujuan dari pengelompokkan ini adalah untuk mempermudah penanganan masalah-masalah yang ada sehingga implementasi kebijakan *Abenomics* bisa berjalan secara fokus dan mendapatkan hasil yang optimal. Misalnya saja, untuk mengatasi deflasi yang terjadi di Jepang, pemerintah mengelompokkkannya kedalam kebijakan stimulus moneter. Sedangkan untuk sumber dana Kebijakan *Abenomics* mendapatkan dana dari BOJ dan anggaran pemerintah.

4. Akses formal pihak luar, pemerintah memberikan peluang-peluang bagi masyarakat atau kelompok sasaran untuk berpartisisasi pada pelaksanaan kebijakan *Abenomics* . Akses ini dimaksudkan agar masyarakat atau kelompok sasaran dapat mengawasi dan dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program-program dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pelaksanaan kebijakan dengan sistem terbuka ini tentunya selain membantu meringankan tugas pemerintah tetapi juga dapat menimbulkan rasa kepercayaaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

5. Kondisi teknologi, teknologi yang memadai juga merupakan faktor kunci tercapainya tujuan dalam implementasi kebijakan *Abenomics.*  Contoh di kebijakan reformasi struktural untuk program *cool Japan*. Pemerintah melibatkan kemajuan teknologi Jepang untuk mempermudah implementasi program *cool Japan* dalammenyebarkan budaya dan konten Jepang ke seluruh dunia. Penerapan kecanggihan teknologi Jepang salah satunya adalah teknologi *virtual vocaloid* (*humanoid persona*) atau virtual singer seperti Hatsune Miku.

**Kesimpulan**

Dalam rangka memperbaiki ekonomi Jepang yang mengalami resesi. Pemerintah Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe pada tahun 2012 mengeluarkan sebuah paket kebijakan yang dikenal dengan sebutan *Abenomics*. Kebijakan ini terdiri atas 3 pilar kebijakan utama yaitu, stimulus moneter, stimulus fiskal dan reformasi struktural. Inti kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi yang diharapkan mampu mengatasi masalah perekonomian serta meningkatkan permintaan domestik, meningkatkan pertumbuhan *gross domestic product* (GDP) sekaligus meningkatkan inflasi, meningkatkan prospek negara dengan meningkatkan daya saing, reformasi pasar tenaga kerja, dan memperluas kemitraan perdagangan. Implementasi kebijakan *Abenomics* yaitu stimulus moneter, stimulus fiskal dan reformasi struktural belum menampakkan hasil yang diharapkan oleh pemerintah Jepang. Hal ini terlihat dari tidak tecapainya target inflasi 2% serta peningkatan pajak konsumsi 10% serta ekonomi jepang yang masih fluktuatif. Meski begitu beberapa keberhasilan pun telah dicapai oleh *Abenomics* yaitu di sektor reformasi pertanian dan reformasi pekerja. Faktor hambatan dari kebijakan *Abenomics* secara keseluruhan dapat terlihat pada keragaman perilaku dan sikap-sikap kelompok sasaran dan kondisi sosial sedangkan faktor pendukung dapat terlihat pada dukungan politik dan publik, rekruitmen dan komitmen serta kemampuan pejabat pelaksana, kejelasan dan konsistensi serta sumber dana, akses formal pihak luar dan kondisi teknologi.

**Referensi**

**Buku**

Beasley, W.G. 1990. *The rise of modern Japan*. Japan : Charles E. Tuttle Company, Inc.

Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogjakarta : PT. Gramedia Putaka Utama

Fahmi Irham, 2010. *Pengantar Politik Ekonomi*. Bandung : ALFABETA

J, M.Papasi. 2010. *Ilmu Politik : Teori dan praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Lipsey, Richard.G., Peter, O.Steiner., Douglas, D.Purvis, 1984. *Ilmu Ekonomi,* Terj. Anas Sidik, Jakarta : BINA AKSARA

Nanga, M. 2001. *Makroekonomi : Teori, Masalah dan Kebijakan.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Solichin Abdul Wahab, 2005. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara

**Internet**

*Abenomics and the Japanese economy* lihat pada <http://www.cfr.org/japan/abenomics-japanese-economy/p30383>

*Abenomics changing on Japanese agriculture* http://fsi.stanford.edu/events/agriculture-abenomics-changing-political-dynamics-japanese-agriculture

*Abenomics, overhyed or underappriciated* lihat <http://www.economist.com/news/leaders/21702751-what-japans-economic-experiment-can-teach-rest-world-overhyped-underappreciated>

*Achievements and problems of Abenomics* lihat pada htttp://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/dy/research/20160623.html

*Analisis peran Jepang* lihat pada [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131392-T%2027492-Peran%20Jepang-Analisis.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131392-T%2027492-Peran%20Jepang-Analisis.pdf.)

*Cool Japan boom* lihat pada http://www.nationmultimedia.com/news/opinion/aec/30202639

*Japan's Economy: Recession, Effect on U.S. and World* lihat https://www.thebalance.com/japan-s-economy-recession-effect-on-u-s-and-world-3306007

*Japan’s 2011 earthquake tsunami and nuclear disaster* lihat <https://www.thebalance.com/japan-s-2011-earthquake-tsunami-and-nuclear-disaster-3305662>

Krisis global 2008-2009 lihat pada journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/download/8333/6506

*Ldp berjaya di pemilu Jepang* lihat https://nasional.sindonews.com/read/937822/149/ldp-berjaya-di-pemilu-jepang-1418696987

*Nasib ekonomi Jepang pasca tsunami* lihat pada <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1314012/nasib-ekonomi-jepang-pasca-tsunami-1>

*Pertahankan kebijakan moneter* lihat http://www.monexnews.com/world-economy/bank-of-japan-pertahankan-kebijakan-moneter-1428477698.htm

*Top Global University Project* lihat <https://www.jsps.go.jp/english/e-tgu/selection.html>

*Will abenomics restore Japan’s growth* lihat http://www.nomurafoundation.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/20130911\_T\_Hoshi\_000.pdf

*Young voters hope reform japan’s silver democracy* lihat http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/08/national/politics-diplomacy/young-voters-hope-reform-japans-silver-democracy/#.WTdfCjXZ8WA

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Adiabas94@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)